



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DPPKBP3A
KABUPATEN
BANYUMAS
2022

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan (catatan : untuk SKPD dengan kondisi tsb).
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya Pandemi Covid 19 yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati

Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021
 33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
 34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
 35. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan Analisa Kinerja Perangkat Daerah.
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.3 Review terhadap Renja DPPKBP3A Tahun 2022.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2022 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2022, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2022.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN ANALISA KINERJA PERANGKAT DAERAH

Analisis capaian kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Triwulan II (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Unit Kerja : DPPKBP3A

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk										
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,78		1,78		1,36		123,6	
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk										
		Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.01		0.01		0,44		4400	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.048.061.527		7.048.061.527		3.500.178.629		49,66
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		40		40	
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		100		100		100	
		Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100		100		100		100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.870.000		17.870.000		3.522.000		19,71
		Dokumen perencanaan	Dokumen	4		4		3		75	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.248.648.609		4.248.648.609		2.097.112.371		49,36
		Tersedianya pelayanan	bulan	12		12		6		50	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Administrasi Keuangan									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				693.703.934		693.703.934		265.129.396		38,22
		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	bulan	12		12		6		50	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				143.073.500		143.073.500		121.025.000		85,59
		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3		3		3		100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.615.513.984		1.615.513.984		655.087.440		40,55
		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3		3		3		100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				452.325.000		452.325.000		358.302.422		79,21

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4		4		4		100	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				116.000.000		116.000.000		21.365.000		25,88
		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2.40		2.40		0,99		158	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				96.000.000		96.000.000		7.961.000		8,30
		Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	dokumen	1		1		0		0	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		11.007.900		55,03

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa	desa	331		331		331		100	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				13.152.006.250		13.152.006.250		3.369.835.827		25,62
		Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100		100		100		100	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	41		41		29,68		72,39	
		Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	65		65		50		76,92	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.378.740.000		1.378.740.000		348.000.000		21,84
		Jumlah Penyuluhan oleh	Kegiatan	620		620		275		44	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PLKB/PKB yang dilaksanakan									
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.593.175.000		1.593.175.000		528.000.000		24.94
		Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	orang	331		331		331		100	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.798.091.250		4.798.091.250		1.026.823.487		21,40
		Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	unit	60		60		57		97	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5.382.000.000		5.382.000.000		1.876.066.000		34,86
		Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	180		180		130		72,22	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				8.564.685.000		8.564.685.000		1.143.533.500		13,35
		Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	18,52		18,52		7,41		40	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				8.564.685.000		8.564.685.000		1.143.533.500		13,35
		Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	Kelompok	15		15		12		80	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak										
		Nilai Kabupaten Layak Anak		625		625		595		95,2	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71,93		71,93		71,74		99,73	
	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan										
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71,93		71,93		71,74		99,73	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				257.000.000		257.000.000		79,154.700		30,80
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100		100		100		100	
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	22		22		22		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				32.000.000		32.000.000		0		0
		Jumlah OPD yang menerapkan PUG	Lembaga	29		29		29		100	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				155.000.000		155.000.000		33.297.200		21,48
		Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	orang	11		11		11		100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				70.000.000		70.000.000		45.857.500		65,51
		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan	lembaga	45		45		45		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		perempuan yang berperan aktif									
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				216.917.600		216.917.600		73.715.500		33,98
		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100		100		100	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				60.100.000		60.100.000		37.678.000		62,70
		Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	kasus	74		74		8		165	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				109.817.600		109.817.600		13.800.000		12,57
		Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	kasus	16		16		4		25	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				47.000.000		47.000.000		22.237.500	47,31	0
		Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	Lembaga	1		1		1		100	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				75.000.000		75.000.000		13.935.000		69.68
		Persentase keluarga yang mendapat	%	0,01		0,01		0,036		360	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga									
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		45.000.000		60
		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	2		2		1		50	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				25.000.000		25.000.000		0		0
		Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar	%	35,71		35,71		0		0	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		perencanaan pembangunan									
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		0		0
		Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	laporan	1		1		0		0	
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak										
		Nilai Kabupaten Layak Anak		625		625		595		95,2	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				35.000.000		35.000.000		13.760.000		39,31
		Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100		100		100		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000		35.000.000		13.760.000		39,31
		Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	Lembaga	28		28		28		100	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				224.996.400		224.996.400		84.160.000		36,6
		Rasio anak korban kekerasan	%	0.009		0.009		0.0028		169	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				67.770.000		67.770.000		17.340.000		25,59
		Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	53		53		17		168	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				157.226.400		157.226.400		70.760.000		45

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	anak	62		62		17		27,41	

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022 masih terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja pelayanan yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, antara lain:

1. Masih rendahnya persentase pemakaian kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan tabel di atas capaian salah satu indikator program KB yaitu Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baru mencapai triwulan II sebesar 29,68 % dari target sekitar 70%. Salah satu penyebabnya yang utama adalah belum adanya momen pelayanan KB secara serentak.

2. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di akhir tahun 2021 menurun

Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender yang digunakan masih indeks tahun 2021 yaitu (71,74) dari target 71,93 namun setiap tahunnya sangat rentan mengalami penurunan, hal ini disebabkan semakin menurunnya jumlah perempuan yang memiliki penghasilan sendiri, banyaknya PHK bagi pekerja perempuan dan faktor lainnya.

3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Walaupun sudah terbentuk UPTD Teknis Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan dilaksanakannya kegiatan pencegahan namun jumlah kasus kekerasan masih menunjukkan frekuensi yang cukup tinggi.

4. Belum adanya peningkatan status Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Banyumas

Sampai dengan akhir 2021 perolehan nilai Kabupaten Layak Anak telah mendapatkan penilaian yaitu 595, hasil evaluasi dan penilaian Kementerian PPPA terkait KLA (Kabupaten Layak Anak) perolehan Penghargaan masih pada jenjang Pratama , yang berarti masih mendapat nilai kurang dari 600 (<600). Hal ini diakibatkan masih belum terpenuhinya infrastruktur –infrastruktur kelembagaan yang menjadi bahan penilaian dalam KLA dimana lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk di Kabupaten Banyumas.

Dalam menyelesaikan permasalahan dan meminimalisir faktor-faktor penyebabnya, maka tindakan yang diambil antara lain:

1. Masih menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam pelaksanaan setiap kegiatan kedinasan agar kegiatan tetap dapat dilakukan namun masih mempertimbangkan unsur kesehatan dan keselamatan semua yang terlibat di dalamnya;

2. Peningkatan pelayanan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah di bidang KKBPK;
3. Peningkatan koordinasi dan efektivitas terhadap perangkat daerah lainnya dan organisasi perempuan sebagai ujung tombak peningkatan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga melalui pemberian advokasi/sosialisasi terkait kesetaraan gender;
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan kasus kekerasan baik kepada anak maupun perempuan, hal ini dimaksudkan agar unsur pemerintah yang lain dan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan sehingga diharapkan dapat mengurangi tingginya kasus kekerasan;
5. Penyiapan dan perencanaan kegiatan yang baik dalam mendukung Kabupaten Layak Anak meningkat lebih baik melalui pemetaan permasalahan dan faktor-faktor penyebab belum maksimalnya Nilai Kabupaten Layak Anak;
6. Memaksimalkan penyerapan anggaran, khususnya Dana Transfer Pusat (DAK) melalui kegiatan-kegiatan yang efektif sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022;
7. Melaksanakan perubahan/pergeseran anggaran, agar efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah lebih meningkat lagi.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 30.379.124.206,00 dengan 10 program dan 24 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp 8.332.247.056 dengan capaian kinerja fisik sebesar 28 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 27,42 %, dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan penyerapan anggaran 0 %;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan penyerapan anggaran 84 %.

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, Silpa anggaran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 22.046.877.150,00.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu-isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah:

1. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
2. Menurunnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
3. Menurunnya kualitas pemberdayaan perempuan;
4. Menurunnya kualitas perlindungan anak.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A mempunyai tugas dan peran strategis dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka peningkatan kinerja organisasi melalui dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan DPPKBP3A adalah informasi dan pemikiran strategis terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi:

1. Pemberian edukasi, komunikasi dan informasi terkait Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Pemberian edukasi, komunikasi dan informasi terkait pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga;
3. Pencegahan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta optimalisasi pemenuhan hak-hak anak.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
2. Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang dan peningkatan peran serta masyarakat.
5. Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan melalui pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan yang berkelanjutan dengan berbasis pada peningkatan kualitas keluarga.
6. Peningkatan upaya pencegahan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap anak serta optimalisasi pemenuhan hak-hak anak.

2.3. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA DPPKBP3A TAHUN 2022

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Perubahan Renstra DPPKBP3A, sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel dibawah ini.

Matrik Perubahan Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[TUJUAN]Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk				
[INDTUJUAN]	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1.78	
[SASARAN]Menurunnya laju pertumbuhan penduduk				
[INDSASARAN]	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.01	
[PROGRAM]X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.581.424.456
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.883.700
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.883.700
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.583.532.538
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.442.572.538
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	34	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				140.960.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	20	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				775.721.494
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.517.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.041.176
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.006.058
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	2	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				299.702.760
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				55.315.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	800	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengandaan yang tersedia	lbr	135000	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				299.139.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	200	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				151.968.500
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				47.582.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	4	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.386.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	10	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	3	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.573.293.224
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.220.600
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.490.072.624
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	78	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.025.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.400.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	177	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				16.500.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	2	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				107.150.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.975.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	10	
[PROGRAM]PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				266.645.500
[INDPROGRAM]	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.40	
[KEGIATAN]Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				74.394.500
[INDKEGIATAN]	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1	
[SUBKEGIATAN]Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				38.394.500
[INDSUBKEGIATAN]	Penyusunan dan review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	Dokumen	1	
[SUBKEGIATAN]Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				15.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) yang mendapatkan pendidikan kependudukan	Sekolah	1	
[SUBKEGIATAN]Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				21.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pendidikan kependudukan	Kelompok	1	
[KEGIATAN]Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				192.251.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	informasi	331	
[SUBKEGIATAN]Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				20.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Buku umpan balik kependudukan yang tersedia	Buku	1	
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				13.440.900.250

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDPROGRAM]	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	
[INDPROGRAM]	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	65	
[INDPROGRAM]	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	41.00	
[KEGIATAN]Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.672.009.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	Keg	620	
[SUBKEGIATAN]Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK				8.200.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana KIE Progam KKBPK yang tersedia (DAK BOKB)	Jenis	3	
[SUBKEGIATAN]Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				1.159.415.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang operasionalnya terfasilitasi (DAK BOKB)	gedung	27	
[SUBKEGIATAN]Pengendalian Program KKBPK				33.099.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pengendalian dan monitoring yang dilaksanakan	Keg		
[KEGIATAN]Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.588.800.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang	331	
[SUBKEGIATAN]Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah petugas dan kader KKBPK yang terfasilitasi kegiatannya	Orang	0	
[SUBKEGIATAN]Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1.588.800.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan penyuluhan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	48	
[KEGIATAN]Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.798.091.250

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDKEGIATAN]	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	Unit	60	
[SUBKEGIATAN]Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				45.445.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusi (DAK BOKB)	Paket	25	
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4.163.160.500
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peserta KB MKJP baru (DAK BOKB)	Orang	6050	
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				555.887.250
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang tersedia (DAK fisik reguler KB)	Jenis	3	
[KEGIATAN]Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5.382.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	180	
[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				5.382.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi kegiatannya (DAK BOKB)	Desa	160	
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				8.101.240.000
[INDPROGRAM]	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	18.52	
[KEGIATAN]Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				8.101.240.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	Kelompok	15	
[SUBKEGIATAN]Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				369.979.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terpenuhi (APBD)	Jenis	2	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengadaan KIT siap nikah anti stunting, pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit stunting yang terpenuhi (DAK fisik penugasan penurunan stunting)	Jenis	2	
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				7.691.261.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	25	
[SUBKEGIATAN]Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				40.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	Keg	6	
[TUJUAN]Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak				
[INDTUJUAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.93	
[INDTUJUAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		625	
[SASARAN]Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan				
[INDSASARAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.93	
[PROGRAM]PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				417.000.000
[INDPROGRAM]	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22	
[INDPROGRAM]	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	
[KEGIATAN]Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				74.500.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah OPD yang menerapkan PUG	OPD	29	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				74.500.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan peningkatan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan	Keg	2	
[KEGIATAN]Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				155.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Orang	11	
[SUBKEGIATAN]Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				5.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	Keg	2	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				150.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah perempuan yang mendapatkan advokasi	Orang	100	
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				187.500.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	45	
[SUBKEGIATAN]Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				187.500.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan KIE PP untuk kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang dilaksanakan	Keg	2	
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				213.243.000
[INDPROGRAM]	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[KEGIATAN]Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				60.100.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	74	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				45.100.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (APBD)	Keg	6	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (DAK PPPA)	Keg	2	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	Keg	2	
[KEGIATAN]Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				106.143.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	16	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				106.143.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang dilaporkan (APBD)	Kasus	52	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan yang terfasilitasi (DAK PPPA)	Keg	51	
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				47.000.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	1	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				24.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasanyang dilaksanakan	Keg	2	
[SUBKEGIATAN]Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				23.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang tersedia	lembaga	1	
[PROGRAM]PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				75.000.000
[INDPROGRAM]	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0.01	
[KEGIATAN]Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Keg	2	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keluarga	60	
[PROGRAM]PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				25.000.000
[INDPROGRAM]	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	35.71	
[KEGIATAN]Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDKEGIATAN]	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	Laporan	1	
[SUBKEGIATAN]Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	OPD	10	
[SASARAN]Meningkatkan kualitas perlindungan anak				
[INDSASARAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		625	
[PROGRAM]PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				35.000.000
[INDPROGRAM]	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	
[KEGIATAN]Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	lembaga	28	
[SUBKEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan	Keg	4	
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				223.671.000
[INDPROGRAM]	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.009	
[KEGIATAN]Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				67.770.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	53	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				67.770.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak (DAK PPPA)	Keg	2	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[KEGIATAN]Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				155.901.000
[INDKEGIATAN]	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	anak	62	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				155.901.000
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap anak yang terfasilitasi	Keg	61	
UPTD				
[TUJUAN]Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk				
[INDTUJUAN]	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1.78	
[SASARAN]Menurunnya laju pertumbuhan penduduk				
[INDSASARAN]	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.01	
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	48	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	5	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	
[TUJUAN]Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak				
[INDTUJUAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.93	
[INDTUJUAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		625	
[SASARAN]Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan				
[INDSASARAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.93	
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				788.364
[INDPROGRAM]	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				788.364
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	1	
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				788.364
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan (DAK PPA)	Keg	1	
[SASARAN]Meningkatkan kualitas perlindungan anak				
[INDSASARAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		625	
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				76.097.636
[INDPROGRAM]	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.009	
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				76.097.636

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
			Target	Rp
[INDKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang berperan aktif	lembaga	1	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				76.097.636
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan (DAK PPA)	Keg	1	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Perubahan Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
				833.914.000	0	0	0	833.914.000	988.914.000	0	0	0	988.914.000	155.000.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				257.000.000	0	0	0	257.000.000	417.000.000	0	0	0	417.000.000	160.000.000	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				32.000.000	0	0	0	32.000.000	74.500.000	0	0	0	74.500.000	42.500.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		32.000.000	0	0	0	32.000.000	74.500.000	0	0	0	74.500.000	42.500.000	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				155.000.000	0	0	0	155.000.000	155.000.000	0	0	0	155.000.000	0	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				70.000.000	0	0	0	70.000.000	187.500.000	0	0	0	187.500.000	117.500.000	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		70.000.000	0	0	0	70.000.000	187.500.000	0	0	0	187.500.000	117.500.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				216.917.600	0	0	0	216.917.600	213.243.000	0	0	0	213.243.000	(3.674.600)	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				60.100.000	0	0	0	60.100.000	60.100.000	0	0	0	60.100.000	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		45.100.000	0	0	0	45.100.000	45.100.000	0	0	0	45.100.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				109.817.600	0	0	0	109.817.600	106.143.000	0	0	0	106.143.000	(3.674.600)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Kelurahan		109.817.600	0	0	0	109.817.600	106.143.000	0	0	0	106.143.000	(3.674.600)	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				47.000.000	0	0	0	47.000.000	47.000.000	0	0	0	47.000.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		24.000.000	0	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0		
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		23.000.000	0	0	0	23.000.000	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				224.996.400	0	0	0	224.996.400	223.671.000	0	0	0	223.671.000	(1.325.400)	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				67.770.000	0	0	0	67.770.000	67.770.000	0	0	0	67.770.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		67.770.000	0	0	0	67.770.000	67.770.000	0	0	0	67.770.000	0	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				157.226.400	0	0	0	157.226.400	155.901.000	0	0	0	155.901.000	(1.325.400)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		157.226.400	0	0	0	157.226.400	155.901.000	0	0	0	155.901.000	(1.325.400)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				28.328.152.777	675.673.500	0	0	29.003.826.277	28.705.641.706	684.568.500	0	0	29.390.210.206	386.383.929	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.048.061.527	123.073.500	0	0	7.171.135.027	7.449.455.956	131.968.500	0	0	7.581.424.456	410.289.429	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.870.000	0	0	0	17.870.000	19.883.700	0	0	0	19.883.700	2.013.700	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		2.380.000	0	0	0	2.380.000	0	0	0	0	0	(2.380.000)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		15.490.000	0	0	0	15.490.000	19.883.700	0	0	0	19.883.700	4.393.700	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.248.648.609	0	0	0	4.248.648.609	4.583.532.538	0	0	0	4.583.532.538	334.883.929	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		4.108.688.609	0	0	0	4.108.688.609	4.442.572.538	0	0	0	4.442.572.538	333.883.929		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		139.960.000	0	0	0	139.960.000	140.960.000	0	0	0	140.960.000	1.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				693.703.934	0	0	0	693.703.934	775.721.494	0	0	0	775.721.494	82.017.560		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		18.606.000	0	0	0	18.606.000	17.517.000	0	0	0	17.517.000	(1.089.000)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		91.641.176	0	0	0	91.641.176	85.041.176	0	0	0	85.041.176	(6.600.000)		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		20.000.358	0	0	0	20.000.358	19.006.058	0	0	0	19.006.058	(994,300)		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		300.600.600	0	0	0	300.600.600	299.702.760	0	0	0	299.702.760	(897,840)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		59.619.500	0	0	0	59.619.500	55.315.500	0	0	0	55.315.500	(4.304.000)		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		203.236.300	0	0	0	203.236.300	299.139.000	0	0	0	299.139.000	95.902.700		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000	123.073.500	0	0	143.073.500	20.000.000	131.968.500	0	0	151.968.500	8.895.000		
Pengadaan Mebel (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		0	31.687.000	0	0	31.687.000	0	47.582.000	0	0	47.582.000	15.895.000		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		0	81.386.500	0	0	81.386.500	0	74.386.500	0	0	74.386.500	(7.000.000)		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		20.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000	0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.615.513.984	0	0	0	1.615.513.984	1.573.293.224	0	0	0	1.573.293.224	(42.220.760)		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		105.441.360	0	0	0	105.441.360	83.220.600	0	0	0	83.220.600	(22.220.760)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	(1.000.000)		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		1.509.072.624	0	0	0	1.509.072.624	1.490.072.624	0	0	0	1.490.072.624	(19.000.000)		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				452.325.000	0	0	0	452.325.000	477.025.000	0	0	0	477.025.000	24.700.000		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		173.850.000	0	0	0	173.850.000	178.400.000	0	0	0	178.400.000	4.550.000		
Pemeliharaan Mebel (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	1.500.000		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		88.500.000	0	0	0	88.500.000	107.150.000	0	0	0	107.150.000	18.650.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		174.975.000	0	0	0	174.975.000	174.975.000	0	0	0	174.975.000	0		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				116.000.000	0	0	0	116.000.000	266.645.500	0	0	0	266.645.500	150.645.500		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				96.000.000	0	0	0	96.000.000	74.394.500	0	0	0	74.394.500	(21.605.500)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		60.000.000	0	0	0	60.000.000	38.394.500	0	0	0	38.394.500	(21.605.500)		
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	0	0	0	20.000.000	192.251.000	0	0	0	192.251.000	172.251.000		
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	67.925.000	0	0	0	67.925.000	67.925.000		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	50.866.000	0	0	0	50.866.000	50.866.000		
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	53.460.000	0	0	0	53.460.000	53.460.000		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				12.599.406.250	552.600.000	0	0	13.152.006.250	12.888.300.250	552.600.000	0	0	13.440.900.250	288.894.000		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.378.740.000	0	0	0	1.378.740.000	1.672.009.000	0	0	0	1.672.009.000	293.269.000		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	4.375.000	0	0	0	4.375.000	4.375.000		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000		
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		95.640.000	0	0	0	95.640.000	8.200.000	0	0	0	8.200.000	(87.440.000)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB			0	0	0	0	0	62.440.000	0	0	0	0	62.440.000	62.440.000	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	379.480.000	0	0	0	0	379.480.000	379.480.000	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		1.283.100.000	0	0	0	1.283.100.000	1.159.415.000	0	0	0	1.159.415.000	(123.685.000)		
Pengendalian Program KKBP (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-PK2UKM DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	33.099.000	0	0	0	33.099.000	33.099.000		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.593.175.000	0	0	0	1.593.175.000	1.588.800.000	0	0	0	1.588.800.000	(4.375.000)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		1.593.175.000	0	0	0	1.593.175.000	1.588.800.000	0	0	0	1.588.800.000	(4.375.000)	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.245.491.250	552.600.000	0	0	4.798.091.250	4.245.491.250	552.600.000	0	0	4.798.091.250	0	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		45.445.500	0	0	0	45.445.500	45.445.500	0	0	0	45.445.500	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		4.196.758.500	0	0	0	4.196.758.500	4.163.160.500	0	0	0	4.163.160.500	(33.598.000)		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		3.287.250	552.600.000	0	0	555.887.250	3.287.250	552.600.000	0	0	555.887.250	0		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik- PK2UKM DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	33.598.000	0	0	0	33.598.000	33.598.000		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5.382.000.000	0	0	0	5.382.000.000	5.382.000.000	0	0	0	5.382.000.000	0		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		5.382.000.000	0	0	0	5.382.000.000	5.382.000.000	0	0	0	5.382.000.000	0		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				8.564.685.000	0	0	0	8.564.685.000	8.101.240.000	0	0	0	8.101.240.000	(463.445.000)		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				8.564.685.000	0	0	0	8.564.685.000	8.101.240.000	0	0	0	8.101.240.000	(463.445.000)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		369.979.000	0	0	0	369.979.000	369.979.000	0	0	0	369.979.000	0		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		8.154.706.000	0	0	0	8.154.706.000	7.691.261.000	0	0	0	7.691.261.000	(463.445.000)		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0		

UPTD

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat Daerah

				103.900.000	0	0	0	103.900.000	108.900.000	0	0	0	108.900.000	5.000.000	
				32.014.000	0	0	0	32.014.000	32.014.000	0	0	0	32.014.000	0	
				22.867.000	0	0	0	22.867.000	22.867.000	0	0	0	22.867.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Semua Kelurahan		9.147.000	0	0	0	9.147.000	9.147.000	0	0	0	9.147.000	0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Semua Kelurahan		4.573.000	0	0	0	4.573.000	4.573.000	0	0	0	4.573.000	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Semua Kelurahan		9.147.000	0	0	0	9.147.000	9.147.000	0	0	0	9.147.000	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.147.000	0	0	0	9.147.000	9.147.000	0	0	0	9.147.000	0	

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Semua Kelurahan		9.147.000	0	0	0	9.147.000	9.147.000	0	0	0	9.147.000	0		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				17.400.000	0	0	0	17.400.000	788.364	0	0	0	788.364	(16.611.636)		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17.400.000	0	0	0	17.400.000	788.364	0	0	0	788.364	(16.611.636)		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Karangpucung		17.400.000	0	0	0	17.400.000	788.364	0	0	0	788.364	(16.611.636)		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				54.486.000	0	0	0	54.486.000	76.097.636	0	0	0	76.097.636	21.611.636		

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
			T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.486.000	0	0	0	54.486.000	76.097.636	0	0	0	76.097.636	21.611.636	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Karangpucung		54.486.000	0	0	0	54.486.000	76.097.636	0	0	0	76.097.636	21.611.636	

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2021, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan DPPKBP3A Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. DPPKBP3A dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

Purwokerto, 2022
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Banyumas



SUYANTO, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19621101 199203 1 007

